



Diterbitkan oleh:  
Laboratorium Pkn FIS UNY



Bekerjasama dengan:  
AP3KNI Wilayah DI Yogyakarta



# PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-I

MENEGUHKAN PERAN PROFESI KEWARGANEGARAAN DALAM MERESPONS  
DINAMIKA KE-INDONESIAAN KONTEMPORER: PERSPEKTIF POLITIK, HUKUM, DAN  
PENDIDIKAN

Editor :

Dr. Samsuri, M.Ag.  
Halili, S.Pd., M.A.



Konferensi Nasional  
Kewarganegaraan

**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-1**

Meneguhkan Peran Profesi Kewarganegaraan dalam Merespons Dinamika Keindonesiaan Kontemporer: Perspektif Politik, Hukum, dan Pendidikan

**Editor:**

Dr. Samsuri, M.Ag.

Halili, S.Pd., M.A.

Cetakan pertama, Januari 2016

vii + 405 halaman

21cm x 29,7cm

ISBN: 978-602-73791-0-7

**Desain sampul dan tata letak:**

Zainal Abidin

**Penerbit:**

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

*Bekerjasama dengan:*

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia

(AP3Kni) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

**Alamat redaksi:**

Gedung G.01 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Sleman DI Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 548202

Fax. (0274) 548201

Email: labpkn@uny.ac.id, labpkn.uny@gmail.com

© all rights reserved

## Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-NYA lah penyusunan prosiding sebagai bagian dari Konferensi Nasional Kewarganegaraan (KNKn) Ke-I ini bisa diselesaikan dengan seoptimal yang mungkin diupayakan. Shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Rasul Junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sang pemberi terang dalam perjalanan kehidupan umat manusia.

Prosiding ini merupakan kumpulan dari hampir seluruh makalah yang disajikan oleh para penyaji/presenter dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan ke-I yang pada tahun 2015 ini mengangkat tema besar "Meneguhkan Peran Profesi Kewarganegaraan dalam Merespons Dinamika Keindonesiaan Kontemporer: Perspektif Politik, Hukum, dan Pendidikan" yang secara keseluruhan berjumlah 27 makalah baik untuk sesi pleno maupun sesi parallel yang dibagi menjadi tiga panel yaitu Pendidikan, Politik, dan Hukum. Sebenarnya total presentasi berjumlah 29 sesi dari sesi pembicara kunci (*keynote speech*) hingga sesi paralel. Namun karena beberapa alasan teknis, presentasi dalam sesi pembicara kunci dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ses Ditjen Belmawa), Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, dan pembicara utama sesi pleno, Dr. Suhardi dari CRCS Universitas Gadjah Mada, tidak dimasukkan dalam prosiding ini.

Konferensi ini mengangkat tema "Meneguhkan Peran Profesi Kewarganegaraan dalam Merespons Dinamika Keindonesiaan Kontemporer: Perspektif Politik, Hukum, dan Pendidikan" dimaksudkan untuk memberikan ruang ilmiah akademis yang memadai dari tiga perspektif ilmu bagi kajian-kajian berbasis penelitian dan pemikiran kritis untuk penguatan profesi kewarganegaraan di Indonesia. Tentu muncul pertanyaan, mengapa bidang kajian keilmuan moral atau filsafat moral tidak masuk dalam tema. Dalam pertimbangan yang mengemuka dalam diskusi-diskusi awal Komite Eksekutif

Konferensi ini, kajian dan studi mengenai pendidikan moral, pendidikan nilai, atau pendidikan karakter sudah tercakup dalam bidang pendidikan. Namun demikian, di masa-masa mendatang, Konferensi dapat secara khusus mengangkat tema-tema filsafat atau moral jika dalam diskusi dan rapat Komite dengan mempertimbangan tuntutan objektif faktual dan keilmuan memang dibutuhkan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantuk kesuksesan penyelenggaraan Konferensi dan penerbitan prosiding Konferensi ini. Sangat banyak pihak yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan Konferensi ini, mulai dari Menristekdikti RI hingga para mahasiswa yang tergabung dalam Lingkaran Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusi (LinK-DeHAM).

Akhirnya, kami atas nama Komite Eksekutif KNKn berharap bahwa prosiding yang telah disusun dan diterbitkan dengan penuh kerja keras dan kerja cerdas ini dapat bermanfaat untuk memperkuat referensi dan literature ilmiah kajian kewarganegaraan dalam makna sempit di lembaga-lembaga pendidikan dan dalam makna yang luas di keluarga dan masyarakat.

Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam prosiding dan dalam penyelenggaraan Konferensi. Kritik dan masukan para pihak tentu kami sangat harapkan demi perbaikan kualitas prosiding dan penyelenggaraan Konferensi di masa-masa yang akan datang.

Yogyakarta, 1 Januari 2016

Ketua Komite Eksekutif KNKn,



Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.

## Daftar Isi

Halaman Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
<b>MAKALAH SESI PLENO</b>	
I. Penguatan Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Dinamika Kurikulum —Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.	1-17
II. Urgensi Kebijakan Berwatak Multikultural Di Indonesia —Dr. Suharno, M.Si.	18-28
III. Keutamaan Kewargaan Sebagai Misi Pendidikan Kewarganegaraan —Dr. Samsuri, M.Ag.	29-39
<b>MAKALAH SESI PARALEL</b>	
<b>I. Panel Pendidikan</b>	
1. Kontribusi Kosmopolitanisme Terhadap Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Survei pada Siswa Pendidikan Menengah Kota Cimahi) —Dr. Lili Halimah, M.Pd.	40-56
2. Pedagogi Kritis Dan Belajar Sepanjang Hayat Sebagai Tantangan Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan —Suyato	57-73
3. Tantangan Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Abad 21 —Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.	74-87
4. Eksistensi Pancasila Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Kontemporer Pendidikan Kewarganegaraan Konteks Keindonesiaan —Yayuk Hidayah	88-98
5. Pendidikan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural —Ruslan, S.Pd., M.Ed.	99-108
6. Model Pembelajaran "Active Learning" dengan Strategi Pengajuan Pertanyaan untuk Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran PKn —Dodik Kariadi, M.Pd.	109-120

7. Pendidikan Politik yang Berkarakter dalam Penanaman Nilai Nasionalisme dan Pancasila  
--Arif Bulan 121-132
8. Wahana Pengembangan Sikap Kemandirian Siswa Melalui Gerakan Pramuka  
—Nurhadianto 133-143
9. Relevansi Pembelajaran Berbasis Kaizen dengan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Mutu Lulusan  
—Bagus Ananda Kurniawan 144-157

## **MAKALAH SESI PARALEL**

### **II. Panel Politik**

1. Peran Perempuan dalam Bela Negara di Daerah Perbatasan  
—Bismar Arianto 158-169
2. Revitalisasi Ruang Publik: Analisis Kontestasi Penguatan Toleransi Agama Studi Kota Yogyakarta  
—Hasan Sazali 170-181
3. Dinamika Kehidupan Politik Di Indonesia Pada Era Orde Lama Menuju Ke Orde Reformasi Serta Dampaknya Terhadap Ketahanan Nasional  
—Abdul Haris Subarjo dan Subardjo 182-196
4. Simulasi Praktik Model Pendidikan Politik sebagai Salah Satu Formatif Mata Kuliah Pendidikan Politik di Jurusan PPKn FIS Unimed  
—Drs. Halking, M.Si. 197-216
5. Civil Society Dalam Sistem Demokrasi: Penguatan Peran Orang Papua sebagai Masyarakat Warga Negara  
—Dr. Nomensen Mambaku 217-236
6. Kontribusi Sejarah Indonesia dalam Memahami Keindonesiaan di antara Warga Negara Indonesia  
—Dr. Bernarda Meteray 237-255
7. Mendongkrak Partisipasi Pemilu Melalui Pendidikan Politik  
—Buchory MS 256-266
8. Keterwakilan Masyarakat Keturunan Tidayu (Tionghoa, Dayak, Dan Melayu) di Kancah Politik Kota Singkawang  
—Wasis Suprpto 267-276

9. Dilema Pendidikan Politik sebagai Basis Transformasi pada Gerakan Jemaah Tarbiyah  
—Nasiwan 277-297
10. Revitalisasi Peran Partai Politik Islam sebagai Sarana Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia  
—Novianto Ari Prihatin 298-311
11. Institusionalisasi Partai Politik: Tantangan Serius Demokrasi Indonesia  
—Halili 312-327

#### **MAKALAH SESI PARALEL**

##### **III. Panel Hukum**

1. Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat  
—Sumaryati 328-341
2. Analisis Yuridis Kurikulum Satuan Pendidikan Dan Materi Dalam Kompetensi Dasar Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Permendikbud No.54, 64, 66, 67, 68, 69, 70 Tahun 2013  
—Petrus Irianto, SH., M.Pd., MH. 342-361
3. Membangun Hukum Ekonomi Dalam Bingkai Pancasila  
—Hassan Suryono 362-381
4. Kompetensi Dan Faktor Penghambat Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia Siswa Di Sekolah Menengah Atas  
—Dr. Akmal, SH, M.Si. 382-405

(2)

## REVITALISASI RUANG PUBLIK: ANALISIS KONTESTASI PENGUATAN TOLERANSI AGAMA STUDI KOTA YOGYAKARTA

Hasan Sazali

Kandidat Doktor Penyuluhan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada (UGM). Dosen Komunikasi Pada Fakultas Dakwah Dan  
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)  
Email: sazalihasansazali.ma@yahoo.co.id HP. 081361572954

### Abstrak

Penelitian ini mengungkap bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang publik, sebagai media ruang baru bagi masyarakat dalam melakukan interaksi untuk mengekspresikan identitas yang mereka miliki baik dalam pendekatan agama maupun budaya, aspek ini merupakan sebagai suatu penguatan toleransi agama dalam pendekatan kultural. Dalam kondisi hegemoni politik ekonomi dengan pemberlakuan komersialisasi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya sebagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada sektor perekonomian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan metode kualitatif, Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum menjadikan nilai kearifan lokal dan budaya sebagai basis penguatan yang sangat potensial untuk dilakukan dalam optimalisasi penguatan toleransi agama. Optimalisasi kearifan lokal dan budaya sebagai ruang baru banyak di inisiasi oleh masyarakat sebagai startegi pendekatan untuk melakukan penguatan toleransi agama masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta.

**Kata Kunci:** *Revitalisasi Ruang Publik, Penguatan Toleransi Agama*

### Pendahuluan

Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai salah satu negara yang paling majemuk di dunia, dilihat dari segit etnis, bahasa, agama, dan sebagainya. Hal ini disadari betul oleh para *founding fathers* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme itu dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan nilai-nilai persatuan Abdillah (1999). Semangat Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan bangsa ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya banyak digali dari nilai-

nilai luhur kearifan lokal dan budaya masyarakat, dan budaya yang saat ini telah mulai banyak dilupakan oleh generasi sekarang. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat direvitalisasi untuk menjadi ruang publik baru sebagai suatu penguatan toleransi agama dalam pendekatan kultural sebagai basis penguatan toleransi agama bagi masyarakat kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta seluruh pemangku kepentingan khususnya tokoh agama dalam mengoptimalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam melakukan penguatan toleransi agama.

### **Pembahasan**

Revitalisasi dalam tema-tema kajian budaya sering diartikan sebagai suatu respon terhadap adanya suatu perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat yang memungkinkan mengancam akan keberadaan suatu komunitas yang mana dalam komunitas tersebut terdapat norma-norma, nilai, budaya, yang secara turun temurun melalui suatu proses yang panjang dalam perdaban komunitas tersebut dijadikan sebagai prinsip-prinsip hidup dalam melakukan interaksi sosial, di mana prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi suatu kesepakatan bersama bagi setiap individu yang ada. Oleh karena itu revitalisasi memiliki makna yang bermacam-macam, bisa merupakan adaptasi tapi juga bisa menjadi bahagian dari suatu resistensi, kondisi ini sangat tergantung dalam konteks apa dan dalam bentuk apa revitalisasi itu dilakukan

Revitalisasi merupakan suatu langkah politis dan pragmatis untuk menyesuaikan diri dengan suatu perubahan sosial yang ada. Revitalisasi dapat juga dipahami sebagai suatu *social engineering* yang dilakukan oleh aktor dalam menyikapi perubahan dalam sistem sosial. Kearifan lokal merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran budaya yang hidup dalam suatu masyarakat lokal<sup>1</sup>, dapat digunakan sebagai filter untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan sendiri.

---

<sup>1</sup>. Fakta pengingkaran kebudayaan daerah pada masa Orde Baru terjadi sebagai akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Pengingkaran tentang adanya budaya daerah/lokal dalam berbagai dimensinya. Apakah budaya daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial, politik dan ekonomi suatu daerah masih menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan. Organisasi ekonomi yang dulunya yang dijiwai oleh semangat komunal dan juga pengaturan akses yang berbasis komunal, misalnya apakah dapat menjadi sumber nilai. Lihat. Abdullah (2005), Dalam Gunawan, Yunanto, Birowo, Purwanto (Ed) (2005)

Kearifan lokal dan budaya dijadikan sebagai suatu strategi yang diterapkan untuk menangkal kapitalisasi yang terjadi dalam pembangunan. Dalam hal ini peran aktor sangat strategis, peran ini dapat dilakukan dari berbagai sektor salah satunya dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat khususnya dalam melakukan penguatan toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari

Pemerintahan Kota Yogyakarta, yang juga secara sistem pemerintahan merupakan bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus pusat ibu kota provinsi. Dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta, memiliki PERDA berdasarkan PERDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta N0.4 tahun 2011, tentang tatanilai budaya Yogyakarta. Tata nilai budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (*intangible*) yang tak tenilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan dilindungi, dengan peraturan daerah. Maka dari itu Pemerintahan Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 38 tahun 2013. Memasukkan pembangunan kebudayaan merupakan salah satu pendekatan strategis yang dilakukan oleh Pemerintahan kota Yogyakarta dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan berbagai sektor untuk mendorong kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta.

Tata nilai budaya Kota Yogyakarta adalah tatanilai Jawa yang memiliki, semangat pengaktualisasiannya berupa pengarahannya segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam segala resiko apapun (*ora mingkuh*) PERDA DIY N0.4. (2011)

Tata nilai budaya pada umumnya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran yang terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasil konkrit dalam kehidupan. Tata nilai budaya Yogyakarta perlu dirumuskan dalam suatu naskah yang digunakan sebagai kiblat idealitas dalam meraih keutamaan baik bagi warga Yogyakarta sendiri maupun para kader bangsa dari seluruh penjuru Indonesia yang sedang menuntut ilmu dan menempa kepribadian di

Yogyakarta, karena pada hakikatnya manusia itu bukan hanya produk kebudayaan, melainkan juga sekaligus pencipta kebudayaan. Manusia dapat bahkan harus merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban PERDA DIY NO.4. (2011)

Kearifan lokal dan kebudayaan menjadi salah satu pendekatan yang strategis dalam membangun penguatan toleransi agama baik secara struktural maupun kultural yang dimulai dari masyarakat. Apalagi kearifan lokal dan kebudayaan, pada saat ini tidak bisa lagi menutup eksistensinya dalam sistem perkembangan peradaban masyarakat yang lainnya. Dalam teori sistem yang dikembangkan oleh Luhmann, sistem masyarakat yang ada didalamnya kebudayaan dan kearifan lokal, pada perkembangan selanjutnya dia mencoba menguji keberadaannya terhadap sistem yang lainnya. Masyarakat yang hidup didalamnya perlu mengoptimalkan potensinya selaku aktor dengan ikut serta dan berperan secara aktif dalam membangun peradaban terhadap sistem-sistem yang sudah disepakati. Masyarakat dengan berbagai sistem budaya dan kearifan lokal yang dimilikinya bukan objek dari pembangunan melainkan subjek. Menjadi pertanyaan, dalam situasi saat ini, apakah kearifan lokal dan budaya itu mampu menjadi suatu pegangan filosofis hidup masyarakat, dan bukan hanya menjadi komoditi bisnis untuk pemenuhan kebutuhan materi semata? Jawaban ini bisa kita amati di lingkungan masyarakat. Masyarakat Kota Yogyakarta, begitu juga dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta, pada saat ini terus berbenah, dengan menghidupkan seni budaya, yang dikemas dengan berbagai pertunjukan disetiap sudut yang menjadi tempat-tempat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sehingga terkadang ada nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pertunjukan kesenian tersebut tercabut dari nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat

Gambar 1. Peranan Kearifan lokal dan Budaya Dalam Penguatan Toleransi Agama di Kota Yogyakarta



Banyak ungkapan-ungkapan filosofis hidup masyarakat Kota Yogyakarta, yang pada dulunya menjadi suatu sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh pada aspek kehidupan keberagamaan. manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Dari dua ungkapan tersebut. Ungkapan ini berlaku untuk semua penganut agama dan keyakinan yang ada di Kota Yogyakarta, mereka mempercayai aspek *theologis* tersebut. Oleh karena itu, manusia sebagai mikrokosmos yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa, wajib menjaga harmoni alam semesta ini dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme, melainkan harus dengan rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*) bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*).

Untuk membumikan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat dalam menghargai setiap perbedaan, dapat dimulai dari lembaga pendidikan dari setiap tingkatan. Dalam menjawab tantangan perubahan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, sudah seharusnya Pemerintah Kota dan para pemangku kebijakan yang terkait dapat melakukan optimalisasi dalam membumikan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang ada. Optimalisasi ini diwujudkan dalam bentuk merevitalisasi berbagai bentuk kearifan lokal dan budaya sebagai suatu media edukasi bagi masyarakat dalam hidup lebih bertoleran.

Dalam melaksanakan ibadah. Manusia memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan komunikasinya, sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Tidak seorangpun berhak untuk memaksa kepercayaannya terhadap orang lain. Orang harus toleran dan menjaga perasaan orang lain (*amemangun karyénak tyasing sasama*) dalam keberbedaan keyakinan satu sama lain. Tidak seorang pun layak merasa paling benar ketakwaannya kepada Tuhan (*ora golèk beneré dhéwé*) karena peribadatan yang dijalankannya, sebab derajat ketakwaan seseorang lebih dinilai dari perilaku kongkritnya dalam kehidupan sehari-hari.

Ungkapan *ngono ya ngono neng ojo ngono*, memiliki arti untuk lebih menghargai perbedaan. Agama itu akan menemui titik persamaan ketika, agama dipahami sebagai suatu kebutuhan dasar manusia secara ruhaniah. Akan tetapi ia menjadi berbeda dalam pelaksanaan ibadah, didalam proses memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu perbedaan adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan.

Aspek budaya Kota Yogyakarta, memiliki keistimewaan, sehingga banyak julukan yang diberikan kepada kota ini. Kota Yogyakarta memiliki beberapa predikat antara lain: Sebagai Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan Kota Wisata. Kota Yogyakarta adalah Kota yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Ada lagi yang menyebutkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang toleransinya tinggi. Maka dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong seluruh potensi yang ada pada masyarakat untuk menghidupi kembali, budaya-budaya yang telah mejadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Gambar 2. Kegiatan Event Budaya di Kota Yogyakarta



Budaya pada dasarnya memiliki arti penting dalam membangun penguatan toleransi agama pada masyarakat. Gertz melihat agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Banyak simbol-simbol kebudayaan sudah menjadi simbol agama. Pada tahapan selanjutnya akan memunculkan internalisasi kebergamaan seseorang dengan institusi atau organisasi sosial, di mana seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, pengamalan agama yang baik. Pada aspek ini tersendiri. Ada anggapan umum seseorang tidak mungkin menjadi penganut agama yang sejati dan sekaligus menjadi warga yang baik dari ideologi suatu institusi. Kecenderungan ini muncul, menjadikan seseorang "mengaburkan" nilai-nilai kebenaran.

Dari penjelasan di atas. Peneliti tertarik itu menganalisis penjelasan di atas, dengan melakukan pendekatan teorinya Mead mengenai teori interaksionalisme simbolik. Mead memandang tindakan sebagai "unit primitif", dalam menganalisis tindakan, pendekatan Mead hampir sama dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatian pada rangsangan dan tanggapan. Tetapi, stimulus di sini tidak menghasilkan respon manusia secara otomatis dan tanpa dipikirkan. Seperti dikatakan Mead, kita membayangkan stimulus sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan atau perintah. Akan tetapi banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengatas namakan "agama" Ketika terjadi suatu tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok. Ternyata tindakan itu dilakukan lebih kepada persoalan penguatan terhadap eksistensi diri dari suatu kelompok dan lebih pada dorongan persoalan ekonomi.

Akan tetapi sangat disayangkan, Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, yang begitu kuat pada masyarakatnya sebagai media komersialisasi dalam mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pada sektor pariwisata, sehingga nilai-nilai kearifan lokal, budaya yang ada tidak menjadi pandangan hidup sebahagian besar masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, di mana pada era sebelumnya, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya terasa begitu kuat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menurut Peneliti sangat memperhatikan, jika Pemerintah tidak mengambil tindakan kongkrit. Kondisi ini akan berdampak pada plestarian nilai-nilai hidup yang sudah diwariskan oleh para leluhur

akan terkikis sedikit demi sedikit dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kita jumpai pada masyarakat Kota Yogyakarta, dari beberapa peristiwa yang hampir menimbulkan konflik sosial, seperti, peristiwa mahasiswi UGM yang mengatakan masyarakat Kota Yogyakarta tidak berbudaya, peristiwa tato *Hello Kitty* pelajar SMU yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan, peristiwa Cebongan, yang juga memberi dampak pada masyarakat Kota Yogyakarta, yang terakhir pembunuhan mahasiswa dari salah satu PTS di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh pendatang, kesemua peristiwa itu kita melihat, dengan begitu gampangny masyarakat tersulut emosi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Kota Yogyakarta merupakan bahagian sentrum budaya jawa yang ada di nusantara, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak sekali nilai-nilai budaya jawa dan kearifan lokal masyarakatnya yang masih bertahan. Akan tetapi bentuk dan sifatnya sudah tidak sama lagi dengan nilai-nilai budaya jawa dan kearifan lokal pada masa lalu. Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari tujuan pariwisata yang di Indonesia, salah satu yang menjadi daya tarik dari aspek pariwisata di kota ini adalah nilai-nilai budayanya. Pada satu sisi kondisi ini menjadikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tergerus oleh penguasa dan pengusaha dengan mengksplorasinya untuk dijadikan daya tarik tersendiri guna mendongkrak nilai ekonomi masyarakatnya. Hal ini juga masih perlu dipertanyakan, masyarakat yang mana nilai ekonominya meningkat dengan situasi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini.

Ada suatu yang menarik jika kita melihat nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Yogyakarta. Di mana kearifan lokal dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta merupakan bentuk refleksi dari masyarakat tentang sesuatu keyakinannya. Basis budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Yogyakarta menjadi muatan ideologis theologis masyarakat dalam membangun fondasi sistem nilai budaya. Nilai-nilai theologis ini menjadi modal konseptual bagi masyarakat dalam melakukan interaksi, sehingga siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda tidak menjadi persoalan ketikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi dasar mereka dalam melakukan interaksi tersebut.

Salim (2015) Menjelaskan, dalam setiap agama, tentu diajarkan nilai-nilai yang melahirkan norma atau aturan tingkah laku para pemeluknya, walaupun pada dasarnya sumber agama itu adalah nilai-nilai transenden. Keyakinan religius demikian, yang oleh Berger dikatakan dapat membentuk masyarakat kognitif, memberi kemungkinan bagi agama bagi agama untuk berfungsi menjadi pedoman dan petunjuk bagi pola tingkah laku dan corak sosial. Di sinilah agama dapat dijadikan sebagai instrumen integratif bagi masyarakat. Karena agama tidak berupa sistem kepercayaan belaka, melainkan juga mewujudkan sebagai perilaku individu dalam sistem sosial, dan pada proses selanjutnya akan membentuk suatu nilai budaya. Yang menjadi kesepakatan sesama warga masyarakat.

Manusia adalah makhluk berbudaya, oleh sebab itu manusia selalu memiliki keinginan untuk mewariskan kebudayaannya kepada anak cucu. Begitu juga dengan masyarakat kota Yogyakarta. Kolaborasi antar agama dan budaya sebagai perakat hubungan manusia dengan keyakinan yang berbeda sudah ada pada masyarakat Kota Yogyakarta sejak ratusan tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan masih bertahannya rutinitas acara-acara keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta seperti malam Satu Suro yang sudah di elaborasi dengan tata nilai budaya Jawa

Konstruksi makna peringatan "malam Satu Suro" yang sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa, begitu juga dengan masyarakat Kota Yogyakarta, yang menganggap malam ini sebagai suatu malam yang istimewa, istimewa karena ia diyakini saat terbaik untuk mensyukuri hidup dan mawas diri. Tarib (2015) Di antara ritual yang dilakukan masyarakat adalah laku diam, yaitu laku dengan berdiam diri, merenung, mereka menyakini hanya dengan diam manusia mampu mendengarkan batin dan suara hati nurani, untuk melihat kondisi kehidupan saat ini, dan mereka mampu bangkit dari persoalan hidup yang mereka hadapi saat ini. Satu Suro memang di konstruksi sebagai awal bulan yang penuh misteri atau *wingit*, karena memiliki energi yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, Satu Suro selalu diperingati dengan berbagai macam laku spritual untuk menangkal datangnya marabahaya.

Sementara itu sebahagian masyarakat menyambut malam Satu Suro dengan melakukan tirakatan di kampung masing-masing, yang tujuannya mereka berdoa untuk keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sudah menjadi bahagian tatanilai kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta dengan berbagai perbedaan tersebut. Sehingga peringatan malam Satu suro menjadi salah satu media perakat bagi masyarakat dengan berbagai perbedaan. Ada semacam *value* yang kuat bagi masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Satu Suro tersebut. Konstruksi ini begitu kuat terasa tidak hanya bagi masyarakat asli Kota Yogyakarta, tetapi juga bagi para pendatang baik yang baru maupun sudah lama yang bermukim di Kota Yogyakarta.

Gambar 3. Suasana Memperingati Malam Satu Suro Di Kota Yogyakarta



Revitalisasi kearifan lokal malam Satu Suro ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi komersialisasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan. Pada saat ini peringatan malam Satu Suro sudah banyak diperingati oleh warga pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta, dan mereka menyakini, begitu juga dengan latar belakang keyakinan masyarakat, masyarakat yang mengikuti acara ini tidak hanya masyarakat penganut agama Islam, tetapi terdapat juga penganut agama-agama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, Budha, begitu juga dengan para penghayat, mereka tertumpah ruah dalam satu suasana yang sangat sakral.

Revitalisasi nilai kearifan lokal menjadi alternatif ruang baru bagi masyarakat, dengan berbagai perbedaan yang ada. Ruang baru yang diinisiasi dari *value* yang terdapat dalam sistem masyarakat dapat lebih mengakar dan memberikan pengaruh secara kuat dalam tatanan sistem sosial masyarakat. Ruang baru ini sebagai perwujudan dari

penguatan konsep *mutual trust* yang dijadikan oleh masyarakat untuk mengekspresikan berbagai *value* yang mereka miliki tanpa ada pengekangan dalam sistem masyarakat. Untuk memberikan penguatan revitalisasi ruang publik secara struktural perlu ada legitimasi politik yang dibangun secara sistemik oleh Pemerintah kota Yogyakarta, dengan berbagai kebijakan dalam memberikan ruang terhadap hak-hak setiap individu dalam mendapatkan nilai-nilai kebebasan baik berkeyakinan, bersikap, dan hak-hak *civil* sebagai warga negara. Pemerintah Kota Yogyakarta, harus mampu menerapkan kebijakan berdasarkan hak-hak setiap individu tanpa membedakan dari sudut pandang manapun, sehingga kebijakan yang dibangun, bukan kebijakan berdasarkan populasi mayoritas dan minoritas.

#### **Penutup**

Dalam melakukan revitalisasi kearifan lokal dan budaya sebagai suatu ruang publik masyarakat seluruh komponen harus dilibatkan, kondisi ini diawali dari lembaga pendidikan, kemudian lembaga-lembaga yang ada dalam sistem dalam membangun penguatan toleransi agama di Kota Yogyakarta. Pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan revitalisasi ini dengan legitimasi kekuasaan yang dimiliki baik secara politik dan sosial. Pada aspek penguatan toleransi agama revitalisasi ini juga harus ditunjang dengan ketersediaan ruang-ruang publik bagi masyarakat dalam melakukan bentuk ekspresi keberadaan mereka, yang memiliki orientasi ruang publik tanpa "sekat" baik dalam pendekatan agama maupun budaya. Sekiranya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan aspek ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan persoalan konflik sosial baik yang berbentuk SARA maupun yang lainnya. Pendekatan ini secara teoritis muncul dari aspirasi masyarakat yang menginginkan suatu tatanan kehidupan sosial yang harmoni.

Pemerintah Kota Yogyakarta jangan mengeksploitasi budaya dan nilai kearifan lokal masyarakat Kota Yogyakarta sebagai sesuatu kekuatan modal kapital pembangunan, sehingga budaya dan kearifan lokal menjadi ajang kekuatan politik ekonomi dengan menapikan nilai-nilai filosofis yang tergantung dalam nilai budaya dan kearifan lokal. Terkesan saat ini budaya dan nilai kearifan lokal yang dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta hanya bersifat seremonial, dengan alasan pembangunan pada sektor

pariwisata untuk mengangkat pendapatan masyarakat, sehingga budaya dan nilai kearifan lokal terkesan kehilangan "makna nilai" dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

#### Daftar Pustaka

- Abdillah, M, 1999. *Pluralisme Dan Toleransi. Dalam Demokratisasi Dan Otonomi Mencegah Disitegrasi Bangsa*. Kompas. Jakarta
- PERDA (Praturan Daerah Daerah Isimewa Yogyakarta) N0.14 Tahun 2014
- Tarib, M, 2015. Seni Budaya. <http://kayabudaya.blogspot>(diakses pada tanggal 2 Nopember 2015)
- Geertz, C,. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Cet.I. PT. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta
- Gunawan, J, Yunanto, S,E, Purwanti, B, 2005. *Desentralisasi Globalisasi Dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta
- Hardiman, F. B, 2008. *Teori Sistem Nikhlas Luhmann*. Jurnal Driyarkara. Th.XXIX. No.3/2008, hal. 1-15
- K.Sitorus, Fitzgerald, 2008. *Masyarakat Sebagai Sistem-Sistem Autopoesis, Tentang Teori Sosila Nikhlas Luhmann*. Jurnal Driyarkara. Th.XXIX. No.3/2008.hal. 17-36
- Maarif, S. Afifuddin, Ridho. Praja, Ranto,H, 2012. *Mendukung Kesitimewaan Yogyakarta Melalui Prespektif Keilmuan Multidisiplin Guna Membangun Kemandirian Bangsa*. Sekolah Pascasaraja Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. hal 25-45
- Salim, F, 1999. *Agama, Kebudayaan, Dan Konflk Sosial*. Dalam. Demokratisasi Dan Otonomi Mencegah Disintegarasi Bangsa. Kompas. Jakarta
- Sazali, H, 2015. *Penguatan Toleransi Agama Dalam Komunikasi Pembangunan Agama Studi Pemerintahan Kota Bogor Dan Yogyakarta*. Disertasi Progran Studi Penyuluhan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tidak Dipublikasi